

Komunikasi Non Verbal (Kinesik) Sopir Angkutan Jumbo
(Studi Kasus Trayek Lhokseumawe - Lhoksukon)
Harinawati, S.Sos, MA

Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Masyarakat Taluak
dan Masyarakat Aceh di Tapaktuan Aceh Selatan
Ita Fadhliah

Penggunaan Media Sosial *Line* Terhadap Tingkat Efektivitas
Komunikasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Syela Agripa Barus & Subhani, S.Sos, M.Si

Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam
(Studi Kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Padangsidimpuan)
**Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.IKom &
Darmansyah Pulungan. S.Sos, MSP**

Strategi Komunikasi Reje Kampung Terhadap Masyarakat
Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur
(Studi Deskriptif Kampung Toweren Toa
Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)
Subhan. AB, S.Sos.I, S.Pd.I, M.I.Kom

Strategi pemasaran PT. Bpr-Syari'ah Renggali Takengon Dalam
Mengomunikasikan Produk Pembiayaan Pada Nasabah
Hasiun Budi, SE., M.S.M

Penerimaan Partai Politik Islam Pada Kalangan Pemuda di Aceh.
**M. Akmal, S.Sos., MA &
Awaludin Arifin, S.I.Kom., M.I.Kom**

Analisis Kritis Representasi Heroisme Amerika dalam Film
Kamaruddin, S.Sos., M.Si



universitas
MALIKUSSALEH

Jurnal
JURNALISME

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Vol.I No.1 Edisi April 2017

Alamat;

Program Studi Ilmu Komunikasi
Jln. Sumatera No.2 Kampus Bukit Indah
Lhokseumawe – Aceh
[Http://www.unimal.ac.id](http://www.unimal.ac.id)
e-mail: jurnalisme.kom@gmail.com

Terbit 2 kali setahun

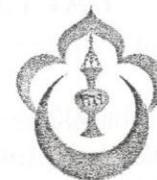
Jurnal JURNALISME

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Penasihat	:	Rektor Universitas Malikussaleh
Pengarah	:	M. Akmal, S.Sos.,MA
Penanggung Jawab	:	Kamaruddin, S.Sos.,M.Si
Pemimpin Redaksi	:	Masriadi, S.Sos., M.Kom.I
Sekretaris Redaksi	:	Awaluddin Arifin, S.Sos.,M.Ikom
Bendahara	:	Dwi Fitri, S.Sos., MA
Anggota Redaksi	:	Deddy Satria M, S.Sos.,M.Si
	:	Subhani, S.Sos.,M.Si
	:	Ainol Mardhiah, S.Ag.,M.Si
	:	Harinawati, S.Sos.,MA
	:	Cindenia Puspasari, S.IP.,M.Soc.Sc
Penyunting Ahli	:	Prof. Deddy Mulyana
	:	Prof. Erman Anom
	:	Dr. Pinkey Triputra
	:	Dr.A.Rani Usman, M.Si
	:	Dr. Hamdani M.Syam
	:	Dr. Irwansyah
	:	Dr. Naimah Wahid
Setting Layout	:	Muhammad Ali, S.Ag.,M.Si
Sirkulasi dan	:	Muhammad Aref, ST
Distribusi	:	Rosna Dewi, S.Sos

Alamat Redaksi

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP – Universitas
Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Jln. Sumatera No.2 Kampus Bukit
Indah
Lhokseumawe – Aceh, [Http://www.unimal.ac.id](http://www.unimal.ac.id)
E-mail: jurnalisme.kom@gmail.com



universitas
MALIKUSSALEH

Salam Redaksi

Syukur dan al-hamdulillah Jurnal Jurnalisme kembali terbit untuk edisi April 2017. Terbitan kali ini merupakan edisi ke lima sejak berdiri pertama kalinya pada tahun 2015. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun pada edisi April dan Agustus oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh. Nantinya jurnal ini tidak hanya saja didistribusikan kepada para penulisnya, melainkan kepada beberapa Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan beberapa perpustakaan.

Jurnal Jurnalisme merupakan jurnal yang fokus pada pemuatan hasil penelitian dan kajian terkait dengan permasalahan dan isu-isu komunikasi, sosial, budaya dan agama yang bertujuan sebagai media mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Karenanya, kami sangat membuka diri bagi para penulis, pemikir dan peneliti untuk menyumbangkan hasil pemikiran pada jurnal ini.

Kami juga menyampaikan terimakasih kepada penulis pada edisi ini, karena telah mempercayai jurnal ini sebagai media dalam menyampaikan ide dan gagasan cemerlangnya

DAFTAR ISI

Hal	
Komunikasi Non Verbal (Kinesik) Sopir Angkutan Jumbo (Studi Kasus Trayek Lhokseumawe - Lhoksukon) Harinawati, S.Sos, MA	1
Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Masyarakat Taluak dan Masyarakat Aceh di Tapaktuan Aceh Selatan Ita Fadhlih	18
Penggunaan Media Sosial <i>Line</i> Terhadap Tingkat Efektivitas Komunikasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Syela Agripa Barus & Subhani, S.Sos, M.Si	40
Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidimpuan) Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.IKom & Darmansyah Pulungan. S.Sos, MSP	58
Strategi Komunikasi Reje Kampung Terhadap Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Deskriptif Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) Subhan. AB, S.Sos.I,S.Pd.I, M.I.Kom	75
Strategi pemasaran PT. Bpr-Syari'ah Renggali Takengon Dalam Mengomunikasikan Produk Pembiayaan Pada Nasabah Hasiun Budi	94

KOMUNIKASI NON VERBAL (KINESIK) SOPIR
Penerimaan Partai Politik Islam Pada Kalangan Pemuda di
Aceh.

**M. Akmal, S.Sos., MA &
Awaludin Arifin, S.I.Kom., M.I.Kom** 109

Analisis Kritis Representasi Heroisme Amerika dalam Film
Kamaruddin 131

PENERIMAAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA KALANGAN PEMUDA DI ACEH.

M. Akmal, S.Sos., MA & Awaludin Arifin, S.I.Kom., M.I.Kom

Dosen Program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Malikussaleh. E-mail; awaludin.arifin@unimal.ac.id

ABSTRAK

Partai politik Islam di Indonesia mengalami pasang surut dalam menghadapi realita politik dari masa ke masa. Sama halnya dengan aspirasi politik umat Islam yang bergerak secara dinamis dan bersifat homogen tidak heterogen. Hal ini tercermin dari aspirasi umat Islam terhadap partai politik Islam itu sendiri. Kendati umat Islam adalah umat mayoritas di Indonesia ternyata jumlah suara pendukung partai-partai politik Islam tidak berbanding lurus. Penelitian ini memperlihatkan salah satu indikatornya ialah ketidak mampuan partai-partai politik Islam dalam menampung aspirasi dan meraih simpatisan kelas pemuda. penelitian ini juga menemukan bahwa terjadi krisis kepemimpinan pada tubuh partai politik Islam yang tidak mampu melahirkan kader-kader terbarunya yang mampu menampung aspirasi umat Islam dalam jumlah yang banyak. Sikap pemuda pada partai politik Islam terlihat sangat absrut, yaitu ketidak pahaman mereka terhadap partai politik Islam secara konseptual, membuat mereka tidak lagi membedakan antara partai Islam dengan partai lainnya yang memiliki dasar ideologi yang berbeda. Berdasarkan temuan penelitian hal tersebut terjadi karena lemahnya komunikasi politik dan sosialisasi politik partai politik Islam kepada kelas pemuda dan masyarakat hingga sampai akar rumput.

Kata Kunci: perilaku politik, partai politik Islam, dan kelas pemuda.

PENDAHULUAN

Relasi antara Islam dan politik di Indonesia menarik untuk diperbincangkan, mengingat aspirasi politik umat Islam Indonesia secara umum homogen dan bergerak sangat dinamis dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspirasi politik umat Islam memperlihatkan bahwa dinamika politik umat Islam juga bergerak sangat dinamis dan terjadi persaingan antar partai Islam dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Persaingan antara partai Islam yang terjadi memperlihatkan kontestasi politik partai Islam saat ini tidak lagi terjadi antara partai Islam melawan partai non-Islam, tetapi antara partai Islam dengan partai Islam lainnya.

Hal ini semakin memperlihatkan kontestasi partai Islam semakin berat dalam perpolitikan di Indonesia. Di Aceh sendiri partai politik Islam memiliki kompetitor lainnya yang lebih berat, yaitu hadirnya partai-partai politik lokal yang memiliki suara publik sangat dominan. Partai-partai politik lokal yang berdiri merubah peta politik Aceh sangat fundamental. Pada masa orde baru suara masyarakat Aceh hampir bulat mengarah pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian ketika masuk ke era reformasi aspirasi politik masyarakat Aceh cukup beragam tidak lagi terfokus pada satu partai. Gejala ini dapat dipahami dikarenakan tumbuhnya partai-partai baru dalam jumlah yang cukup banyak. Pasca konflik menambah kontestasi politik di Aceh semakin beragam. Lahirnya partai politik lokal yang dipandu sendiri oleh putra/i Aceh sendiri semakin membuat nilai tawar partai politik Islam di Aceh terjepit dan nyaris kehilangan konsituennya. Dominasi Partai Aceh (PA) yang hampir menguasai kursi parlemen dan eksekutif dari Gubernur hingga

Bupati/Wali Kota memperlihatkan kurangnya simpatisan publik terhadap partai-partai Islam.

Melemahnya partai Islam sesuai dengan survey yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI) di mana secara politik, partai politik Islam yang mengusung syariat mengalami erosi dukungan elektoral. Survei terakhir mengunci posisi partai Islam di Indonesia pada urutan terbawah pada skala popularitas dan elektabilitas pada Pemilu 2014. Survei yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia menunjukkan elektabilitas partai-partai Islam (PKB, PPP, PAN, PKS) di bawah 5 persen pada Pemilu 2014 (Nubowo, 2013: 15)

Jika dikerecutkan pada publik pemuda di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, aspirasi politik umat Islam dari kalangan muda di Kecamatan Dewantara menunjukkan kurangnya simpatisan mereka terhadap partai politik lokal. Secara keseluruhan, dari Kecamatan Dewantara hanya satu keterwakilan parlemen yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Padahal jumlah pemilih di Kecamatan Utara mencapai 27.000 jiwa yang merupakan jumlah pemilih terbesar di Kabupaten Aceh Utara

Pada tahapan tertentu, peta politik Indonesia sulit dilepas dari pertarungan kelompok Islam versus nasionalis. Polarisasi Islam-nasionalis ini biasanya merujuk pada politik aliran yang diteorisasi Clifford Geerts pada 1950 an. Inti dari teori ini adalah adanya kesamaan ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial yang komprehensif mengikuti asumsi politik aliran, kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai penganut muslim kurang taat cenderung memilih partai nasionalis, sedangkan kelompok santri dipercaya akan menyalurkan suaranya pada partai Islam. Warga NU lebih nyaman

mencoblos partai yang dekat dengan NU. Sebaliknya, pendukung Muhammadiyah dan organisasi modernis lain cenderung memilih partai yang berlatar belakang Islam modernis (Nurhayati & Hasan, 2015: 80)

Penelitian ini ingin melihat secara mendalam bagaimana kelas pemuda menerima partai politik Islam di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Pemuda merupakan bagian dari kelas sosial masyarakat yang keberadaannya sangat mempengaruhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis kemerdekaan Indonesia pun tidak terlepas dari kelas pemuda dan juga masyarakat Muslim. Lahirnya hari sumpah pemuda juga memperlihatkan betapa besar nilai tawar masyarakat kelas pemuda tanah air. Tingkat partisipasi politik pemuda juga kerap dipertanyakan.

LANDASAN TEORI

Partai Politik Islam

Secara definitif, sebagaimana disampaikan Effendy (1998), partai Islam merupakan partai politik yang mengedepankan Islam sebagai azas dan ideologi politiknya yang memperjuangkan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kepentingan politik Islam. Dijadikannya Islam sebagai azas dan ideologi dalam pendirian sebuah partai politik tentunya mempunyai kaitan yang erat dengan tokoh yang akan mendirikan partai tersebut. Dengan demikian, maka hal ini bisa dijadikan pemahaman bahwa partai Islam sangat berhubungan dengan pemikiran tokoh-tokoh Islam yang mempunyai kepentingan politik secara kolektif bagi terbentuknya sebuah partai yang berideologi dan berazaskan Islam

Keberadaan partai politik Islam di Indonesia secara kuantitas cukup memberikan pilihan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Meskipun adanya keragaman pendapat mengenai kuantitas partai, secara lebih jauh partai Islam bisa dianalisis dengan memberikan dua kategori. Dari asas partai, PPP, PBB dan PKS bisa disebut partai Islam karena asas dan ideologinya adalah Islam. Ketiganya memosisikan Islam bukan semata-mata konstruksi teologi, tetapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tak memisahkan agama dan negara (Monshipuri, 1998; Roy, 1993).

Berbeda dengan PAN dan PKB tak bisa disebut Islamis karena keduanya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai universal Islam dan tak punya agenda menghidupkan Piagam Jakarta (Burhanuddin, 2013). Namun demikian, bagi PKB dan PAN, identitas keislaman bisa jelas terlihat dari mayoritas anggota dan organisasi massa yang mewadahi dan menjadi latar belakang didirikannya partai politik, seperti PAN yang tidak bisa dipisahkan secara historis dari Muhammadiyah ditambah para pendiri PAN yang memang terdiri dari para petinggi Muhammadiyah. Hal yang sama terjadi pada PKB yang dibidani oleh para petinggi PBN yang membuat PKB tidak bisa melepaskan identitas ke-NU-annya secara institusional.

Sama halnya dengan partai politik Nasional, pada level partai politik lokal di Aceh juga terdapat parlok yang memiliki basis ideologi agama Islam sebagai landasan partai dan menyediakan perangkat sosial politik yang tidak memisahkan agama dan negara, yaitu Partai Daulat Aceh (PDA). Secara historis partai ini didirikan oleh para pemuka agama di Aceh yang berafiliasi untuk

mendirikan palok yang berbasis Islam. Terhimpun di dalam kepengurusan partai ialah para ulama dan masyarakat Aceh yang memiliki konsen pada agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Yaitu, sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek penelitian yang alamiah. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dan semi-terstruktur serta meninjau berbagai dokumen relevan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Pemahaman Terhadap Partai Politik Islam

Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman pemuda Kecamatan Dewantara terhadap partai Islam di Aceh beragam. Diantaranya ialah 1). Partai politik Islam ialah partai yang didirikan atas ideologi dasarnya adalah Islam, 2). Partai politik yang di dalam kepengurusannya ialah diduduki oleh kalangan ulama (red; Tgk) dan dari kalangan santri Dayah (red: Pondok Pesantren), 3). Partai politik yang menggunakan simbol-simbol Islam sebagai lambang partainya, dan 4). Partai politik yang memiliki program kerja yang banyak membela kepentingan Islam dalam kerja nyatanya. Namun, poin terakhir ini mereka beranggapan bahwa partai nasional yang tidak berideologikan Islam juga memiliki program kerja yang berafiliasi dengan Islam, seperti partai Perindo yang didirikan oleh Hari Tanoesudibjo yang berlatar belakang agama Katolik dalam praktik politik partainya berafiliasi dengan Islam secara nyata.

Bahkan dalam banyak siaran televisi secara terang-terangan ketua umum partai disambut baik oleh kalangan ulama dan umat Islam.

Pemahaman terhadap partai politik Islam tidak dilihat dari asas ideologi partai, publik lebih melihat sejauh mana partai mampu memajukan dan menjaga Islam sebagai agama serta membela hak-hak umat Muslim. Publik pemuda tidak mempersoalkan ideologi partai tertentu mengacu pada konsep partai berbasis Islam. Pola pemahaman semacam ini kemudian yang membuat mereka tidak penting untuk membedakan antara partai Islam atau partai yang tidak memiliki embel-embel Islam. Yang diharapkan oleh publik melalui partai Islam ialah bagaimana partai mampu memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara dan sebagai Umat Islam. Hal ini terlihat jelas dari beberapa inroman penelitian yang hampir keseluruhannya memiliki kesamaan pandangan tentang hal tersebut. Diantaranya ialah seperti yang dikemukakan oleh Fakhurrazi (25) sebagai berikut:

“saya tidak begitu memahami bagaimana sebenarnya partai Islam itu sendiri. Selama ini saya Cuma tau bahwa partai Islam itu kayak PPP, PKS, PKB itu aja. Itu karena mungkin mereka menggunakan simbol-simbol Islam juga mereka sering membicarakan tentang Islam, dan sama-sama kita tau bahwa mereka berbicara banyak tentang Islam. Jadi ya, cocok aja kalau kita bilang mereka adalah partai Islam”

Partai politik Islam sebagai partai politik yang bisa diidentifikasi sebagai partai politik yang membawa bendera Islam sebagai alat politik mengandalkan segmen massa kaum muslim sebagai konsituennya, baik yang tersebar secara kolektif (dalam organisasi-organisasi keislaman, atau lembaga-lembaga Islam dan kolektivitas masyarakat yang mayoritas Islam) maupun

sumber suara yang bersifat individual. Partai politik Islam seharusnya mampu memberikan harapan yang besar bagi perubahan yang diinginkan masyarakat mayoritas muslim dan mewujudkan harapan itu dalam bentuk keberpihakan pada masyarakat dalam setiap kebijakan berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Karenanya Islam tidak lagi hanya dipandang sebagai agama yang hanya sebatas rutinitas ritual. Masyarakat Islam umumnya memosisikan Islam bukan semata-mata konstruksi teologi. Tetapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tak memisahkan agama dan negara (Monshipuri, 1998; Roy, 1993).

Keberadaan partai politik Islam di Indonesia secara kuantitas cukup memberikan pilihan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Meskipun adanya keragaman pendapat mengenai kuantitas partai, secara lebih jauh partai Islam bisa dianalisis dengan memberikan dua kategori. Dari asas partai, PPP, PBB dan PKS bisa disebut partai Islam karena asas dan ideologinya adalah Islam. Ketiganya memosisikan Islam bukan semata-mata konstruksi teologi, tetapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tak memisahkan agama dan negara (Monshipuri, 1998; Roy, 1993). Berbeda dengan PAN dan PKB tak bisa disebut Islamis karena keduanya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai universal Islam dan tak punya agenda menghidupkan Piagam Jakarta (Muhatadi, 2013). Namun demikian, bagi PKB dan PAN, identitas keislaman bisa jelas terlihat dari mayoritas anggota dan organisasi massa yang mewadahi dan menjadi latar belakang didirikannya partai politik, seperti PAN yang tidak bisa dipisahkan secara historis dari Muhammadiyah ditambah para pendiri PAN yang memang terdiri dari para petinggi Muhammadiyah. Hal yang sama

terjadi pada PKB yang dibidani oleh para petinggi PBNU yang membuat PKB tidak bisa melepaskan identitas ke-NU-annya secara institusional.

Tabel: Klasifikasi partai Islam menurut Informan

Kategori	Partai Nasional	Partai Lokal
Ideologi Islam	PKS, PBB, PPP, PBR	PDA
Nilai-Nilai Islam	PAN dan PKB	-

Keragaman pemuda Kecamatan Dewantara dalam memberikan pemahaman tentang partai Islam memperlihatkan satu gambaran nyata bahwa partai-partai Islam saat ini tidak memberikan kepuasan atas harapan publik yang semestinya dijawab. Imbasnya ialah publik tidak mengenal partai sebagai sebuah lembaga serta kader partainya sebagai individu yang membela mereka. Minimnya sosialisasi partai-partai Islam juga menjadi hal yang sangat signifikan mempegaruhi pemahaman pemuda dalam memahami partai Islam dengan baik. Sejauh ini pula, partai-partai Islam di Aceh belum menunjukkan identitasnya dengan jelas. Program-program kerja yang ditunjukkan cenderung melepaskan simbol-simbol Islam yang mestinya Islam adalah acuan mereka dalam bertindak dan berperilaku.

Secara rasional, seorang pemilih akan memutuskan memilih kandidat tertentu setelah mempertimbangkan sejauh mana program-program yang disodorkan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya, atau sebaliknya malah merugikan. Para pemilih akan cenderung memilih kandidat

yang kerugiannya paling minim dengan menetapkan pilihannya secara *retrospektif*, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi penilaian terhadap pemerintah di masa lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintah yang berkuasa (juga bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tersebut tidak akan dipilih kembali. Beberapa indikator yang biasa dipakai para pemilih untuk menilai seorang kandidat khususnya bagi pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, kompetensi, dan integritas kandidat

Ekspektasi Kelas Pemuda Terhadap Partai Politik Islam

Partai Politik Islam baik parlok dan parnas masih memiliki peluang yang sama dalam menarik suara pemilih kelas pemuda. Hanya saja tinggal bagaimana masing-masing partai memanfaatkan peluang kontestasi tersebut dengan baik. Secara ideologi partai politik Islam tentu lebih diuntungkan ketimbang partai non-Islam, dimana partai politik Islam memiliki kesempatan besar dalam meraih suara publik yang menghendaki penegakkan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh. Penegakkan syari'at Islam dipandang sebagai sebuah keharusan di Aceh sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Akan tetapi mereka tidak melihat satu partai politik Islam maupun partai lainnya yang memiliki wacana syari'at Islam yang konkret. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal (20) menurutnya perbincangan tentang syariat Islam dalam wacana politik Aceh tidak

diperbincangkan secara serius. Hal ini menurutnya adalah ketidak sungguhan politisi Aceh sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan hukum syari'at Islam.

“... lagipula, sepertinya mereka (politisi) tidak memikirkan tentang syari'at Islam dengan serius. Contohnya isu-isu penegakkan syari'at Islam sama sekali tidak masuk dalam visi-misi calon kepala daerah yang naik pada tahun ini. Kalau kita lihat visi-misi mereka mencalonkan sebagai Gubernur atau Bupati Aceh Utara persis seperti daerah lainnya, program pendidikan, ekonomi, pengangguran, tapi syari'at Islam sama sekali tidak ada (bahasa asli wawancara ini adalah bahasa Aceh. Peneliti menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami)”

Dengan demikian, jika partai politik Islam memiliki wacana konkret tentang bagaimana semestinya syari'at Islam dapat ditegakkan di Aceh, maka sendirinya partai Islam akan mampu menarik simpatisan kelas pemuda ini. Peluang ini pun semakin terbuka lebar, dikarenakan partai lainnya tidak menjadikan isu tersebut sebagai isu strategis. Aspirasi ini sejalan dengan harapan publik, dari 20 informan yang peneliti minta keterangan mereka terkait dengan harapan mereka penerapan syari'at Islam 18 diantaranya berharap agar syari'at Islam di Aceh dapat ditegakkan dengan baik.

Expektasi publik terhadap penegakkan syari'at Islam diantaranya ialah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh, menjauhkan diri dari agama sama halnya menjauhkan rahmat Ilahi dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat di Aceh. Kesejahteraan tidak mungkin dapat terwujud, jika secara terang-terangan kemaksiatan dan kemungkaran terus saja terjadi di Aceh. Karenanya, partai politik Islam tidak hanya berkutik pada persoalan bagaimana syari'at Islam ditegakkan tanpa diiringi dengan

tindakan nyata dan berbuat nyata agar harapan publik seperti di atas dapat terpenuhi, jika tidak. Maka, wacana syariat Islam hanya sebatas wacana pada tataran nalar syari'at fiqih dan tidak mampu menjawab persoalan masyarakat secara substansi seperti persoalan kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Ketidakadilan dalam mendistribusikan kekayaan sumber daya alam, membuat publik berharap agar Islam hadir sebagai jawaban ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan yang kian jauh. Saat ini Indonesia berada pada tingkat ketimpangan terburuk ke-4. *World Bank* mencatat 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77 persen dari total kekayaan Indonesia. Laporan data perusahaan manajemen investasi Global Chiedle Suisse mencatat pada tahun 2014 1 persen kelompok terkaya Indonesia menguasai 50,3 persen total aset utang dan properti Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah gagal mendistribusikan kekayaan meratakan pembangunan hingga akar rumput (Kompas, 12/01/2017).

Banyak studi memperlihatkan bahwa konsepsi hukum syariat (*qanun*) masih terjebak pada konsepsi syariat Abad Pertengahan Islam, di mana hukum-hukum fikih yang ditawarkan tampak tidak mampu mencakup persoalan baru abad ke-21. Perda-perda syariat tersebut, secara umum, mengatur tiga aspek kehidupan publik ; (1) pemberantasan kejahatan sosial, terutama prostitusi dan perjudian, (2) penghormatan pada ibadah wajib umat Islam seperti membaca Al-Quran, shalat berjamaah hari Jumat dan puasa Ramadhan, dan (3) peraturan cara berpakaian di ruang publik, terutama jilbab bagi perempuan (Candraningrum, 2007: 296)

Jika demikian wacana syariat Islam yang digaungkan akan tumpul terasa manakala harapan publik tidak mampu tertampung oleh partai-partai Islam, sebab Islam diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan problem, isu, dan kepentingan publik. Pada saat yang sama, publik atau masyarakat Muslim dapat berkontribusi pada pemecahan masalah, isu dan kepentingan publik aktual dan berpartisipasi pada pengawalan aspirasi-aspirasi kerakyatan tersebut menjadi kebijakan publik yang maslahat. Dalam hal ini, politik umat Islam mengadvokasi dan mengagregasi kepentingan publik pada pemangku dan pengambil kebijakan di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Singkat kata, politik Islam ke depan adalah politik advokasi dan agregasi isu dan kepentingan publik yang digali dari basis, komunitas atau kelas sosial.

Selanjutnya, dalam kontestasi politik yang tidak kalah pentingnya ialah bagaimana partai-partai Islam mampu untuk melibatkan peran serta masyarakat secara kolektif. Disadari atau tidak, sikap apatis masyarakat terhadap politik berdampak serius pada kualitas bernegara kita. Terlebih jika sikap tersebut terletak pada kelas pemuda yang seharusnya kekayaan gagasan, ide dan pemikiran mereka mampu menghadirkan suasana baru dalam perpolitikan tanah air. Nyatanya, pemuda cenderung bersifat apatis dalam persoalan politik. Memang sejauh ini belum ditemukan studi maupun riset secara eksplisit mendeskripsikan keadaan ini apalagi di Kecamatan Dewantara. Cukup menggembirakan saat peneliti mendapatkan informasi bahwa informan dalam penelitian ini peduli terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Secara terang-terangan mereka bersedia untuk memberikan suaranya dalam pemilukada nantinya. Namun, di antara mereka hanya dua dari

sepuluh orang yang terlibat dalam politik praktis pemilukada yang akan diselenggarakan pada pemilukada 2014.

Jika diamati secara serius hal ini menunjukkan bahwa pemuda Dewantara umumnya berposisi sebagai “objek” politik bukan “subjek”. Artinya, sejauh ini partai-partai politik tidak mampu melibatkan diri mereka secara langsung untuk menjadi bagian mesin partai. Umumnya mereka hanya mengikuti perkembangan isu-isu politik di media massa.

Kekosongan ini yang semestinya dimanfaatkan dengan baik oleh partai-partai politik Islam dengan memberikan perbuatan nyata yang menunjukkan keberpihakan mereka pada umat Islam. Perlu pergerakan pemberdayaan politik kelas pemuda dengan cara-cara yang juga sesuai dengan usia dan karakter yang mereka miliki. Dalam ruang lingkup lokal, tentu partai-partai politik Islam sangat diuntungkan di Aceh dalam hal ini. Perda syari’at Islam yang umumnya adalah pembicaraan pada tingkat elit politik serta hanya sebagian masyarakat minoritas Islam minoritas yang mendukungnya. Akan tetapi, dukungan untuk diterapkan hukum Islam di Aceh mendapat dukungan penuh dari masyarakat akar rumput hingga elit politik.

Dengan kata lain, Politik Islam perlu melakukan gerakan pemberdayaan dan pencerahan masyarakat. Menyatu padukan gerakan politik dan sosial dapat dimulai dengan menghidupkan kembali basis-basis populer kerakyatan yang memiliki peran strategis, yakni tempat ibadah, balai desa/ kelurahan, dan pasar tradisional. Ketiga lapak kerakyatan itu penting untuk dihidupkan kembali, mengingat di situlah ruang berkumpul, bersilaturahmi dan berdialog antar warga. Di ketiga lapak itu pulalah, petani, buruh, nelayan, hingga pedagang, saudagar, dan para pegawai bertukar sapa.

Dalam konteks ke-Acehan Amrijal J. Prang (2010) Aceh memiliki otonomi dengan mendirikan partai lokal. di Aceh terdapat tiga partai Lokal, yaitu Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Damai Aceh (PDA), dan Partai Aceh (PA). Pasal 11 UU Parpol juncto Pasal 79 UUPA disebutkan salah satunya ialah partisipasi politik sebagai sarana seluruh warga negara seperti yang terurai sebagai berikut:

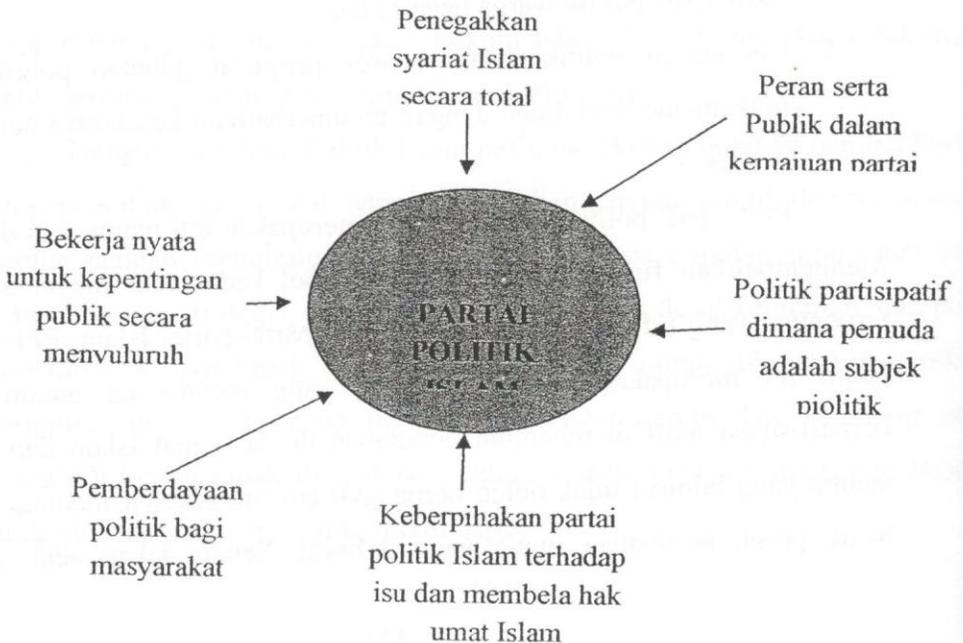
1. pendidikan politik anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partisipasi politik secara terbuka merupakan inti utama dari demokrasi. Mengembalikan fungsi partai sebagai simbol kedaulatan rakyat adalah hal terpenting yang tidak boleh terlupakan oleh partai-partai Islam. Etika dan etos Islam ini merupakan spirit kemajuan, yang mendorong umatnya untuk berpartisipasi aktif membangun peradaban dunia. Umat Islam dan penganut agama yang lainnya tidak boleh berpangku tangan, sekedar menjadi penonton hiruk pikuk perubahan dunia yang dahsyat. Sebab, sikap acuh dan cuek

terhadap dunia menjadikan dunia kehilangan ruh spiritualitasnya dan kering nilai-nilai transendental. Pembangunan yang kering dari nilai-nilai moral dan keimanan akan melahirkan krisis kemanusiaan dan disorientasi keberpihakan pada rakyat miskin, wong cilik. Proyek-proyek yang dilangsungkan hanya berorientasi akumulasi modal dan penyingkiran dan pemiskinan kaum miskin dan *mustad'afin*.

Dengan kata lain, iman yang benar adalah iman partisipatoris: keimanan yang memadukan tauhid dan kebijakan sosial. Kaum beriman tidak boleh hanya menganggap ibadah mahdilah seperti shalat, puasa, zakat dan haji sebagai *one way to paradise*, tetapi juga perlu diintegrasikan pada kesalehan dan kebajikan dalam makna berpartisipasi dan berkontribusi sebagai aktor utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ekspektasi Pemuda Terhadap Partai Politik Islam



Penilaian Pemuda Terhadap Partai Politik Islam

Penilaian umum pemuda Kecamatan Dewantara terhadap partai-partai Islam dapat diurutkan sebagai berikut:

Tabel. 4.3. Penilaian pemuda terhadap partai-partai Islam

Informan	Pendapat
1	Tidak memperlihatkan kinerja yang konkret terhadap kepentingan masyarakat
2	Tidak mampu menciptakan kader yang relegius sebagai penerus partai
3	Kader partai Islam tidak memperlihatkan kepribadian yang relegius, kecuali kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4	Tokoh partai politik Islam tidak mampu memperjuangkan hak-hak orang Islam
5	Tokoh partai Islam tidak berdaya ketika Islam disudutkan oleh pihak tertentu
6	Lemahnya wacana penerapan Syari'at Islam yang disuarakan oleh partai Islam

Persoalan lemahnya kaderisasi partai politik Islam menjadi persoalan serius, sehingga partai politik Islam tidak lagi menjadi pilihan logis para pemilih pemuda. Tentu kondisi ini juga terjadi dalam skala Nasional yang menunjukkan bahwa torehan suara partai-partai Islam semakin melemah dari waktu ke waktu, terlebih pada pemilihan tahun 2009 menjadi Pemilu yang

paling menyedihkan bagi partai-partai Islam. Pada Pemilu itu, total suara partai-partai Islam adalah yang terburuk jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 1955 (44%) dan Pemilu setelahnya. Jika pada Pemilu 2004 mereka memperoleh 41 %, suara mereka turun drastis menjadi hanya 29,2 persen pada 2009. Yang lebih ironis, hanya 4 parpol Islam yang berhasil lolos *parliamentary treshold* (ambang batas suara di parlemen) pada Pemilu tahun 2004 itu, yaitu: PKS, PAN, PKB, dan PPP (Tanuwidjaya, 2010: 30)

Menurut Greg Fealy (2013: 85) persoalan lemahnya kaderisasi dalam Partai Islam dan tidak adanya pemimpin yang kharismatis adalah problem mendasar yang juga menyebabkan partai-partai Islam mengalami senjakala politiknya. Para tokoh Islam yang aktif dalam Partai Islam terus mengalami penurunan kualitas dibandingkan ketika tahun-tahun awal reformasi

Untuk memastikan sejauh mana pemuda Dewantara mengenal tokoh-tokoh partai politik Islam, peneliti menanyakan sosok dari partai politik Islam. Hanya beberapa informan yang mampu menyebutkan tokoh partai politik Islam. Pada saat tokoh partai politik Islam lokal (Aceh Utara) yang ditanyakan, justru tidak satupun diantara mereka yang mampu menyebutkan tokoh. Mereka hanya mengenal tokoh-tokoh Islam yang tidak memiliki keterkiatan dan ikatan apapun dengan partai (dalam hal ini peneliti hanya menanyakan tokoh politik Partai politik Islam yang masih hidup)

Tokoh partai politik Islam Nasional yang mereka kenal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Tokoh Partai Politik Islam Yang Paling Dikenal

Nama Tokoh	Partai Politik
Amien Rais	Partai Amanat Nasional (PAN)
Hatta Radjasa	Partai Amanat Nasional (PAN)
Yusril Ihza Mahendra	Partai Bintang Reformasi (PBR)
Lhutfi Hasan Ishaq	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Annis Matalata	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Tidak familiarnya tokoh-tokoh dari partai politik Islam memperlihatkan bahwa partai-parati Islam belum mampu melahirkan individu yang terkenal di hadapan publik. Hal yang sangat mencengangkan juga bahwa ternyata kelas pemuda di Kecamatan Dewantara tidak mengenal sosok dari partai politik Islam dari kalangan pemuda. Sosok politisi dari partai Islam cenderung diketahui karena pemberitaan media, kecuali Amien Rais yang dikenal sebagai pahlawan reformasi yang menggulingkan Suharto. Jasa rahardja dikenal karena beberapa kali duduk dalam kabinet SBY-JK dan SBY-Boediono dan juga sebagai cawapres bersama Prabowo. Sedangkan Yusril Ihza Mahendra dikenal publik karena kecerdasannya dalam bidang hukum tata negara. Publik mengenalnya sebagai pendiri partai PBR juga sebagai akademisi, lawyer dan pakar huku. Sedangkan tokoh lainnya dikenal karena skandal tertentu. Contoh, Lhutfi Hasan Ishaq dikenal karena kasus korupsi, sedangkan Ramhrozi karena perselisihan pada elit PPP.

Kondisi ironi partai Islam tersebut tentu tidak akan terjadi berlarut dan terlihat tidak ada strategi yang komprehensif untuk mengantisipasi hilangnya suara pemuda dari partai-partai Islam. Penting sekali partai-partai Islam untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan elit masyarakat hingga masyarakat akar rumput, karena kedua kemampuan ini bisa dijadikan sebagai sarana sosialisasi program kerja parpol Islam untuk mengambil hati masyarakat. Meskipun ada beberapa stereotip negatif terhadap partai Islam karena beberapa kasus yang melibatkan beberapa orang petinggi di partai politik Islam, namun dengan adanya interaksi dan komunikasi yang baik bisa meyakinkan publik bahwa akan adanya perbaikan dan masih banyak kebijakan partai yang bisa dijadikan komitmen dan kontrak sosial

KESIMPULAN

Aspirasi politik umat Islam yang bervariasi, dinamis dan homogen mengharuskan partai-partai politik Islam untuk bekerja dengan gigih guna memenangi kontestasi perpolitikan tanah air. Penting bagi partai-partai politik Islam mengambil pelajaran penting atas kegagalan mereka pada pemilu 2009 & 2014. Studi ini memperlihatkan juga partai-partai Islam belum mampu memperkenalkan diri mereka pada kelas pemuda yang mayoritas adalah pemilih pemula yang belum memiliki pandangan politik yang matang, sehingga pandangan politik mereka cenderung mudah dipengaruhi. Pimpinan partai juga belum mampu mewariskan kepada generasi pemuda. tidak tersedianya kelas pemuda pada organisasi partai setidaknya memperlihatkan beberapa hal, yaitu sistem pengkaderan partai yang tidak dilakukan secara baik dan berkesinambungan, komunikasi dan sosialisasi politik yang tidak merata

kepada masyarakat, serta kegagalan partai Islam dalam meraih suara kelas pemuda

DAFTAR PUSTAKA

- Candraningrum, Dewi (2007) *Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Sharia Ordinance (Perda Syariah)*, *Al-Jami'ah*, Vol. 45, No. 2, 2007 M/1428 H.
- Azca, Muhammad Najib (2013). *YANG MUDA, YANG RADIKAL: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru*. MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013
- Tanuwidjaya, Sunny, (2010) 'Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the Evidence of Islam's Political Decline', *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Volume 32, Number 1, April
- Fanani, Ahmad Fuad.(2013) *Dilema partai Politik Islam: terpuruk dalam kegagalan atau menjawab tantangan*.Maarif Vol. 8 No. 2
- Nubowo, Andar (2013) *Arah Baru Politik Islam di Indonesia: Dari Nalar Syariatik Menuju IslamPartisipatoris-Transformatif*. Maarif Vol. 8 No. 2
- Nurhayati, Cucu & Hasan, Hamka (2015). *Penerimaan Partai Politik Islam di PTAIN: Studi Atas Perilaku Politik Mahasiswa di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015

Budiardjo, Miriam (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.

J.Prang, (2014). *Mal Praktik Politik*. Harian Serambi Indonesia Edisi 02 Januari 2014

Moloeng, Lexy J (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Muhtadi, Burhanuddin (2013). *Perang Bintang 2014*. Jakarta: Noura,.

Nilan, Pam dan Feixa, Charles (2006). *Global Youth? Hybrid Identity, Plural Worlds*. New York: Routledge,

Roth, Dieter (2009). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teoriteori, Instrumen dan Metode*. Friedrich-Naumann-Stiftung dan LSI. Jakarta,

Saebeni, (2008) *Metode Penelitian*. Bandung Pustaka Setia

Sugiyono,(2008) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: CV. Alfabeta